

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Adi Y. Rogahang<sup>1</sup>, Anderson G. Kumenaung<sup>2</sup>, Ita Pingkan F. Rorong<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email:

[r3re.1979@gmail.com](mailto:r3re.1979@gmail.com)<sup>(1)</sup>, [andersonkumenaung@unsrat.ac.id](mailto:andersonkumenaung@unsrat.ac.id)<sup>(2)</sup>, [itapingkan@unsrat.ac.id](mailto:itapingkan@unsrat.ac.id)<sup>(3)</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh faktor demografi (rasio penduduk dan rasio penduduk miskin) dan faktor geografis (rasio wilayah dan rasio IKG) terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada masa pandemi di kabupaten minahasa tenggara. (2) Untuk mengetahui efektivitas dana desa dilihat dari pengalokasian dana desa dan kinerja desa dalam meningkatkan perekonomian desa.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, panduan observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan: kertas kerja perhitungan dana desa dan postur APBDes berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda.. Hasil penelitian ini adalah: (1) Secara parsial terdapat pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif baik untuk ratio penduduk, penduduk miskin dan ratio luas wilayah terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten minahasa tenggara; Sebaliknya secara parsial indeks kesulitan geografis tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa; (2) Secara bersama-sama ratio penduduk, ratio penduduk miskin, ratio luas wilayah dan indeks kesulitan geografis (IKG) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa dengan pengaruh terbesar adalah ratio penduduk terhadap pengelolaan dana desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; (3) Variasi perubahan efektivitas pengelolaan dana desa 97,17% disebabkan oleh variasi perubahan keempat variabel bebas yang dipilih dalam penelitian ini; (4) Kualitas pengelolaan dana desa di kabupaten minahasa tenggara berada pada level sangat efektif. (5) Terdapat 47 desa dengan status maju dilihat dari indeks desa mandiri, namun tingkat efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten minahasa tenggara masih harus ditingkatkan. Rekomendasi dari penelitian ini untuk pemerintah desa kedepannya dapat memberikan kebijakan terhadap pengelolaan dan penyaluran dana desa serta pencatatan aset desa dengan tetap memperhatikan penguatan peran dari kelembagaan pemerintah di desa. Transparansi pengelolaan anggaran desa kepada lembaga pemerintahan yang ada di desa pada berbagai bidang yang ada agar dana desa yang di salurkan sesuai dengan yang telah direncanakan.

**Kata kunci :** Dana desa, efektivitas, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa.

### ABSTRACT

This study aims to determine (1) The effect of demographic and geographical factors on the effectiveness of village fund management during the pandemic in southeast minahasa regency. (2) To determine the effectiveness of the village fund, it can be seen from the allocation of village funds and village performance in improving the village economy.

This research uses multiple linear regression analysis method. Data collection techniques are interviews, observation guides and documentation. Data used: working paper for calculating village funds and APBDes posture in the form of income, expenditure and financing. Data analysis uses multiple linear regression analysis. The results of this study are: (1) Partially there is a significant and positive relationship between the ratio of population, poor population and the ratio of area to village fund management in southeast minahasa regency; On the other hand, the geographical difficulty index partially has no significant effect on the management of the village fund; (2) Together, the population ratio, poor population ratio, area ratio and geographical difficulty index (IKG) have a significant effect on the management of village funds with the largest influence being the ratio of population to village fund management in the field of development and empowerment of rural communities; (3) Variations in changes in the

*effectiveness of village fund management 97.17% are caused by variations in changes in the four independent variables selected in this study; (4) The quality of village fund management in southeast minahasa regency is at the very effective level. (5) There are 47 villages with developed status as seen from the independent village index, but the level of effectiveness of village fund management in southeast minahasa Regency still needs to be improved.*

*Recommendations from this research for the village government in the future can provide policies on the management and distribution of Village Funds and the recording of village assets while still paying attention to strengthening the role of government institutions in the village. Transparency of village budget management to government institutions in the village in various fields so that the Village Funds are distributed according to what has been planned.*

**Keywords:** *Village fund, effectiveness, empowerment and village community development*

## 1. PENDAHULUAN

Proses desentralisasi yang berlangsung memberikan penyadaran betapa pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu melalui pemberdayaan potensi lokal. Pengertian prinsip desentralisasi memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan penyelarasan pembangunan sektoral dan antar desa yang bersumber dari pemerintah serta pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. Meskipun di kondisi sekarang, kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada taraf kabupaten/kota, tetapi secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut wajib dimulai dan berasal dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu desa. Pengertian prinsip otonomi itu sendiri adalah masyarakat mempunyai hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri serta bertanggung-jawab tanpa intervensi negatif yang berasal dari luar. Pemerintah desa diyakini mampu lebih melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup persoalan lebih luas dan kompleks. Mengingat kondisi tersebut, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi warga serta prioritas dan arah pembangunan pedesaan yang sudah ditetapkan.

Sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan sesuai perhitungan rasio alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kondisi kesulitan geografis desa di setiap kabupaten/kota. Setiap tahun pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk lebih mengefektifkan manfaat dana desa. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 di kondisi masa pandemi untuk pembangunan desa dialokasikan dalam mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan, melalui: a) Pemenuhan kebutuhan dasar, b) Pembangunan sarana dan prasarana desa, c) Pengembangan potensi ekonomi lokal, d) Pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

Peraturan Mendagri No.20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memperjelas struktur pengelolaan keuangan, alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDes untuk lebih mengefektifkan pengelolaannya. Situs keuangan desa dirancang untuk memahami tata pengelolaan keuangan desa, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Efektivitas penyelenggaraan dana desa sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan desa. Suatu tinjauan literatur berkenaan dengan efektivitas penyelenggaraan dana desa di Indonesia telah dikaji oleh banyak peneliti (antara lain: Astini, dkk., 2018; Nurhayati, 2017; Boedijono, dkk., 2019; Tinuwo, dkk., 2017; Karimah, dkk., 2014); Isti, dkk., 2017; Mada, dkk., 2017; Babeng, dkk., 2018; Utari & Sujana, 2019;; Ramly, dkk., 2017; Saputra, 2016; Munti & Fahlevi, 2017; Meutia & Liliana, 2017; Warsono & Ruksamin, 2014; Rahmawati, 2015; Imawan, dkk., 2019; Darson, dkk., 2018).

**Tabel 1 Rekapitulasi APBDes Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021**

URAIAN	JUMLAH
<b>PENDAPATAN</b>	
Pendapatan Asli Desa	664,774,967.00
Pendapatan Transfer	165,773,665,269.00
Pendapatan Lain-lain	586,211,266.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>167,024,651,502.00</b>
<b>BELANJA</b>	
Belanja Pegawai	58,873,650,500.00
Belanja Barang dan Jasa	44,586,450,932.40
Belanja Modal	42,777,311,969.38
Belanja Tidak Terduga	18,325,800,983.59
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>164,563,214,385.37</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	
Penerimaan Pembiayaan	3,376,371,790.11
Pengeluaran Pembiayaan	5,746,678,403.04
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>-2,370,306,612.93</b>

Sumber : Sistem Informasi Keuangan Desa (SisKeuDes) Tahun 2021

Penelitian ini akan mengkaji efektivitas pengalokasian dana desa di kabupaten minahasa tenggara terutama di masa pandemi tahun 2021 untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penelitian ini akan mengangkat kondisi demografi (penduduk dan penduduk miskin) serta kondisi geografis (luas wilayah dan indeks kesulitan geografis atau IKG) menjadi faktor penentu efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten minahasa tenggara. Pengelolaan dana desa yang efektif akan meningkatkan kemandirian desa secara ekonomi melalui pendapatan asli

Desa melalui dana desa harus mampu meningkatkan kinerja desa serta menciptakan dan mengembangkan pendapatan asli desa melalui produk unggulan desa dan inovasi desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh rasio penduduk, rasio penduduk miskin, rasio luas wilayah dan rasio indeks kesulitan geografis (IKG) terhadap pengelolaan dana desa tahun anggaran (TA) 2021 di kabupaten minahasa tenggara ?
2. Bagaimanakah pengaruh secara simultan rasio jumlah penduduk, rasio penduduk miskin, rasio luas wilayah dan rasio indeks kesulitan geografis terhadap pengelolaan dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa TA 2021 di kabupaten minahasa tenggara?
3. Bagaimana efektifitas dana desa dilihat dari pengalokasian dana desa TA 2021 dan kinerja desa di kabupaten minahasa tenggara?

**Tujuan penelitian ini untuk :**

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor demografi dan geografis terhadap efektivitas pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Kabupaten Minahasa Tenggara. dan
2. Untuk mengetahui peparuh secara simultan rasio jumlah penduduk, rasio penduduk miskin, rasio luas wilayah dan rasio indeks kesulitan geografis terhadap pengelolaan dana desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Minahasa Tenggara
3. Untuk mengetahui efektivitas dana desa dilihat dari pengalokasian dana desa Tahun Anggaran 2021 dan kinerja desa dalam meningkatkan perekonomian desa.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori Perencanaan Pembangunan**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan sebuah lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2016).

Setiap upaya pembangunan ekonomi di daerah tentu mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus berupaya secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam proses penyusunan program pembangunan daerah. Dengan demikian,

pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan setiap sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi setiap sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (unique value) dari daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Siwu, 2019).

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan suatu proses perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumber daya publik dan sektor swasta (misalnya petani, pengusaha kecil, koperasi, pengusaha besar, organisasi sosial) harus mempunyai peran dalam proses perencanaan. Dengan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah, akan tergambar secara keseluruhan dapat dilihat sebagai sebuah unit ekonomi atau (economic entity) di mana terdapat interaksi dari antara berbagai pihak. Adanya perbedaan kondisi sosial-ekonomi pada setiap daerah juga akan membawa implikasi pada adanya perbedaan derajat dan cakupan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan bahwa jika perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, maka tingkat ketidakmerataan antar daerah biasanya cenderung untuk meningkat dan bukannya semakin mengecil, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk ditempat-tempat atau daerah-daerah tertentu sedangkan tempat-tempat atau daerah-daerah lainnya akan semakin ketinggalan. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan oleh berbagai hal, misalkan kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan membawa pengaruh yang negatif bagi daerah-daerah lain, karena adanya perpindahan tenaga kerja, modal, dan perdagangan ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut. Khususnya migrasi tenaga kerja, biasanya bersifat selektif, sehingga migrasi itu sendiri pun cenderung untuk menguntungkan daerah-daerah yang sedang mengalami ekspansi ekonomi dan merugikan daerah-daerah lain (Arsyad, 2010).

Perbedaan mendasar antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi hanya menekankan kenaikan produk regional domestik bruto tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan dalam pembangunan ekonomi,

laju dikatakan ada kenaikan jika terjadi laju kenaikan produk regional domestik bruto melebihi kenaikan pertumbuhan penduduk, namun keduanya tetap menekankan pada kenaikan produk regional domestik bruto. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi cenderung lebih melihat kenaikan tanpa melihat konsekuensi yang terjadi tanpa melakukan perbaikan kondisi yang ada, Jadi penekanannya hanya pada penambahan sarana publik seperti pengadaan listrik, jembatan, dan jalan-jalan penunjang aktivitas perekonomian. Berbeda dengan pembangunan ekonomi yang tidak hanya menekankan pada pertumbuhan secara fisik tetapi menekankan juga pada perbaikan proses kelembagaan, kondisi ekonomi di lapangan seperti mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, serta struktur yang ada supaya lebih berhasil memberi benefit. Pembangunan atau perkembangan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian disamping kenaikan output. Jadi pada umumnya pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan atau perkembangan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi akan memberikan manfaat utama yaitu terjadinya penambahan output dan kekayaan suatu masyarakat atau suatu perekonomian sehingga hal tersebut akan memberikan kemampuan yang lebih besar bagi manusia untuk menguasai dan mengolah sumber daya alam yang ada disekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasan dalam mengadakan suatu tindakan tertentu (Irawan, 1992).

### **Pembangunan Desa**

Teori agensi, menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agents untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada organisasi sektor publik dibangun atas dasar teori agensi. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai agents bagi masyarakat desa (principals) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada agent untuk melakukan semua pekerjaan secara bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan menjadi kepanjangan dari masyarakat desa sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan agensi teori pengelolaan pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan

ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Istilah desa dari beberapa daerah berbeda-beda, di Sumatera Barat desa disebut dengan istilah nagari. Menurut Nurcholis (2011) desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya.

Menurut PP Nomor 43 Tahun 2014, pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa, yang meliputi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang desa, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 1 ayat (20) tentang pedoman pembangunan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa, karena dengan adanya APBDesa kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya.

### **Pendapatan Desa**

Dijelaskan melalui pasal 11 peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, bahwa pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu Semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan oleh desa, merupakan pendapatan desa.

### **Belanja Desa**

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal (15), mengatakan bahwa semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

### **Pembiayaan Desa**

Dijelaskan dalam pasal 24 peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **Penyusunan Rancangan APBDesa**

Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa. Dijelaskan menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bagian kesatu pada pasal 31, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Selanjutnya sekretaris mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB desa berdasarkan RKP desa yang diatur dengan peraturan bupati/walikota setiap tahun sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain untuk dievaluasi. Bupati/walikota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Jika hasil evaluasi tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Penjelasan pasal 38 permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang APBDesa. Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APBDesa.

### **Pelaksanaan Apbdesa**

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 43 tentang pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa harus memenuhi ketentuan berikut ini: Hal yang berkaitan dengan pendapatan (penerimaan) dan pengeluaran (belanja) desa dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan; Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan; program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa; Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; pemungutan pendapatan desa diintenskan oleh kepala desa; tidak dibenarkan melakukan pungutan oleh pemerintah desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama; Membebaskan pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga; dan Bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.

Proses pencairan dana dengan menerbitkan SPP pencairan oleh admin aplikasi siskeudes dikabupaten melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Walaupun penatausahaan keuangan desa secara nasional masih menganut transaksi cash basis dimana transaksi dicatat setelah uang diterima, namun dalam prakteknya transaksi keuangan desa di kabupaten minahasa tenggara telah menerapkan transaksi non tunai melalui kasdes online bekerja sama dengan BUMD yaitu Bank SulutGo. Dimana hal ini diharapkan mampu membantu pemerintah desa dalam mengontrol transaksi keuangan melalui rekening koran / RC perbankan

dengan melakukan proses maker oleh bendahara, proses checker oleh sekretaris desa dan approval oleh kepala desa (Hukum Tua) dan juga diharapkan mampu membatasi pemerintah desa dalam menjaga amanah dari pengelolaan dana desa itu sendiri.

### **Perubahan APBDesa**

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 pasal 40 sampai dengan 41 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, bahwa perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

### **Penatausahaan Keuangan Desa**

Penatausahaan penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan buku kas harian pembantu. menurut Sujarweni (2015) bendahara harus mengeluarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek penerimaan, dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengeluaran, disertai dengan lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan bukti atas penyetoran PPN dan PPh ke kas negara.

### **Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDesa**

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam pasal 70, peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa akan disusun oleh sekretaris desa dan akan disampaikan

kepada bupati/walikota melalui camat. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa yang diperoleh oleh desa akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, terdapat 5 (lima) tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan**

Proses perencanaan keuangan desa menurut permendagri nomor 20 tahun 2018, terlebih dahulu sekretaris menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa agar dibahas dan disepakati secara bersama badan permusyawaratan desa jangka waktu paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Setelah rancangan tersebut dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa secara bersama, maka rancangan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Setelah rancangan tersebut disepakati oleh bupati/walikota selanjutnya ia mendelegasikan hasil evaluasi tersebut kepada kepala desa melalui camat untuk ditetapkan sebagai APBDesa.

Jika hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila kepala desa tidak

menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, dan akan ditetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa oleh kepala desa, maka bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan atau biasa disebut dengan penggerakkan menurut Manila I. GK. (1996:28) adalah aktivitas aktuasi, yang berarti setelah rencana terbentuk manajer harus memimpin menggerakkan para staf/bawahannya berdasarkan pada rencana itu dengan maksud untuk mewujudkan rencana. Pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa.

## **3. Penatausahaan**

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban merupakan tugas wajib bendahara desa.

## **4. Pelaporan**

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

## **5. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Implementasi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memiliki hambatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia
- b. Swadaya masyarakat
- c. Pengawasan masyarakat
- d. Partisipasi masyarakat
- e. Perubahan anggaran

Menurut Husna (2016) pengembangan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Meningkatkan tingkat pendidikan

Bagi para perangkat desa yang memiliki pendidikan yang masih rendah seperti, setingkat SD (sekolah dasar) dan SMP (sekolah menengah pertama) maupun yang belum tamat SMA (sekolah menengah atas) diwajibkan untuk menempuh pendidikan melalui kelompok belajar paket A, B dan C. Jika perangkat desa yang telah berpendidikan setingkat SMA juga diharapkan dapat diberi beasiswa untuk kuliah, sehingga perangkat desa tersebut bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat yang dilayaninya dan menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkompeten.

#### 2. Diklat (pendidikan dan pelatihan)

Untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan perangkat desa baik secara softskill maupun hardskill dapat dilakukan dengan adanya diklat, yang diselenggarakan oleh lembaga khusus. Diklat dilakukan kepada semua perangkat desa yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perangkat desa sesuai dengan bidangnya.

#### 3. Kursus atau in house training

Kursus merupakan suatu pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan keterampilan kepada perangkat desa yang belum memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja sesuai dengan bidangnya. In house training merupakan pelatihan yang diberikan kepada perangkat desa dengan cara mengundang pelatih profesional ke tempat/lokasi kerja tersebut.

#### 4. Pengembangan sistem seleksi perangkat desa

Sistem seleksi yang baik diperlukan agar, dapat merekrut dan menciptakan perangkat desa yang berkualitas dan handal, serta mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang tugas yang akan ditempatkan dan diberikan.

### **Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini peneliti mengambil jurnal internasional dan jurnal nasional sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

### **Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini terkait pengelolaan dana desa di kabupaten minahasa tenggara berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, merupakan pedoman dalam pengelolaan dana desa, yang memiliki 5 (lima) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa tidak terlepas dari faktor yang menghambat pengelolaan dana desa tersebut sehingga tidak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa.

### **Hipotesis**

1. Diduga secara parsial rasio penduduk, rasio penduduk miskin, rasio luas wilayah, rasio indeks kesulitan geografis (IKG) mempengaruhi pengelolaan dana desa pada masa pandemi di kabupaten minahasa tenggara.
2. Diduga secara bersama-sama Rasio Penduduk, Rasio Penduduk Miskin, Rasio Luas Wilayah dan Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa pada masa pandemi di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Analisis Rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer langsung diperoleh dari kepala desa (hukum tua), perangkat desa, masyarakat yang memahami konteks masalah yang diteliti.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh pada badan keuangan daerah dan badan pemberdayaan masyarakat dan desa. Penelitian ini mengambil data dana desa dan informasi desa lainnya dari 135 desa pada 12 kecamatan di kabupaten minahasa tenggara

### **Metode Pengumpulan Data**

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu panduan wawancara, panduan observasi dan pengambilan dokumentasi.

Peneliti mengumpulkan data/informasi peraturan terkait pembangunan desa seperti undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, PP nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pengumpulan data langsung ke instansi terkait di kabupaten minahasa tenggara.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel dalam penelitian ini adalah : Sumber dana desa yang digunakan dalam penghitungan dana desa setiap desa berasal dari rincian dana desa setiap kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden tentang rincian APBN / APBN-P.

Dana desa setiap desa dihitung berdasarkan:

- a) Alokasi dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
- b) Alokasi afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; dan
- c) Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota, dengan bobot sebagai berikut:
  1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
  4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

## Metode Analisis Data

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui efektifitas pengelolaan dana desa (jumlah dana desa yang diterima oleh 135 desa) melalui analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan dana desa (faktor demografi dan faktor geografi) adalah analisis regresi linier berganda.

Analisis regresi linier berganda adalah salah satu teknik statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel independen yang bersifat linier terhadap satu variabel dependen. Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah ordinary least square (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali, 2005).

### 1. Model Persamaan

Persamaan matematis untuk model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Log}Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

Y = Dana Desa

X1 = Rasio Penduduk

X2 = Rasio Penduduk Miskin

X3 = Rasio Wilayah

X4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG)

e = Error term

$\beta_0$  = Intersep

$\beta_1 - \beta_4$  = koefisien regresi

### 2. Pengujian Hasil Persamaan Regresi

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima. Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria ketetapan (godness of fit): (i) koefisien determinasi (ii) uji statistik F, dan (iii) uji statistik t.

## a. Koefisien Determinasi.

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.

Formula menghitung koefisien determinasi adalah:

$$R^2 = (TSS - SSE) / TSS = SSR / TSS$$

Keterangan:

TSS = total jumlah kuadrat

SSE = jumlah pangkat error

SSR = jumlah pangkat karena regresi

Persamaan tersebut menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat (TSS) yang dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, formulasi model yang keliru, dan kesalahan eksperimental (Mendenhall et al dalam Kuncoro, 2013:246). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## b. Uji signifikansi simultan (Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2013:245)

## c. Uji signifikansi individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_i$ ) sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen.

Hipotesis alternatif parameter suatu variabel tidak sama dengan nol.

$$H_a: b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2013:244).

### 3. Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

#### b. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linier yang perfect atau exact di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bisa didektesi keberadaannya bila  $R^2$  dari auxiliary regression melebihi  $R^2$  regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai varian inflation factor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas.

Jika suatu persamaan mengalami kondisi ketidakbebasan secara linier (dimana terdapat suatu baris/kolom yang merupakan kombinasi linier baris/kolom yang lain) maka sistem persamaan tersebut tidak akan memiliki solusi. Hal ini terjadi jika variabel bebas yang ada pada model mengalami multikolinieritas sempurna. Sedangkan jika multikolinieritas adalah tidak sempurna, maka kesulitan yang terjadi adalah kesulitan dalam inferensi karena standar error yang bersifat Variabel (Ariefianto, 2012:52).

c. Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas ( $Y_i$ ) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas ( $X_i$ ), maka varian dari  $Y_i$  adalah tidak sama. Gejala heteroskedasitas lebih sering dalam data cross section dari pada time series. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas  $n(p \text{ value})$  observasi  $R^2$  lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan  $\alpha = 5 \%$ ), maka residual digolongkan homoskedasitas.

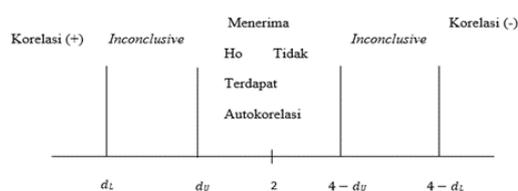
Asumsi penting (asumsi Gauss Markov) dalam penggunaan Ordinary Least Square (OLS) adalah varians residual yang konstan. Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut homokedastis. Jika tidak, disebut heterokedastis (Ariefianto, 2012:37).

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu, besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) dimana apabila probabilitas  $f$  hitung  $> \alpha$  ( $5 \%$ ), maka bebas dari autokorelasi.

Pendeteksian ada atau tidak adanya autokorelasi dapat juga dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson yaitu dengan cara membandingkan antara nilai Durbin Watson statistik dengan nilai Durbin Watson hitung. Dengan kriteria pengujian:

**Uji Durbin Watson**



- Jika  $d < d_L$  atau  $d > 4 - d_L$  maka  $H_0$  ditolak
- Jika  $d_U < d < 4 - d_U$  maka gagal tolak  $H_0$
- Jika  $d_L < d < d_U$  atau  $4 - d_U < d < 4 - d_L$  maka inconclusive

Jika kita memiliki model regresi yang mengalami autokorelasi, maka estimator OLS yang diperoleh adalah tetap tidak bias, konsisten dan secara asimtotik akan terdistribusi dengan normal.

Namun demikian ia menjadi tidak Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) karena varians residual regresi adalah tidak minimum pada estimator kelas linier (Ariefianto, 2012:28).

Analisis efektivitas dana desa akan membandingkan rasio alokasi awal dan besarnya dana desa yang diterima setiap desa dengan kinerja desa. Hasil penilaian kriteria efektivitas adalah :

**Hasil Penilaian Kriteria Efektivitas**

No	Pencapaian Indikator	Kualitas Efektifitas
1	80 % ≤ Y	Sangat Efektif
2	60 % ≤ Y < 80 %	Efektif
3	40 % ≤ Y < 60 %	Cukup Efektif
4	20 % ≤ Y < 40 %	Kurang Efektif
5	0 % ≤ Y < 20 %	Sangat Kurang Efektif

Pengertian Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh tingkat keberhasilan atau juga pencapaian dari target yang diraih oleh suatu manajemen, seperti kualitas ataupun kuantitas dan waktu dimana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Secara singkat, efektivitas adalah usaha tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang bisa dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Rumus dan persamaan efektivitas :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Dana Desa}}{\text{Target Dana Desa}} \times 100\%$$

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Pengaruh Faktor Demografi dan Faktor Geografis Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara**

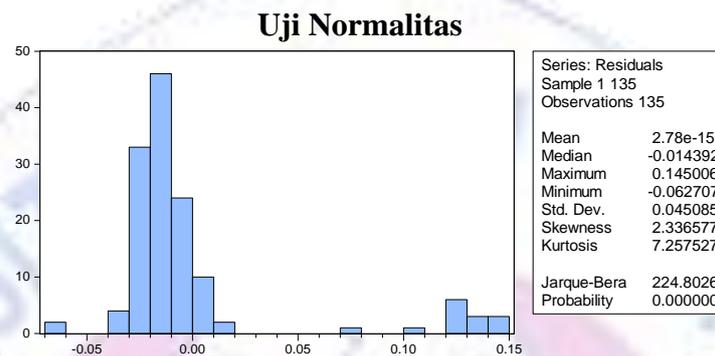
- Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien. Data yang digunakan peneliti adalah data cross section 135 desa yang menerima dana desa. Artinya tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah dengan menggunakan program Eviews 8 yang meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependent, variable independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksinya dapat dilihat dari Histogram Normality Test.

Menggunakan metode Jarque- Bera dengan  $\alpha=0.05$  (5%), jika probability  $> \alpha$ , maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas residual menunjukkan nilai Jarque Bera 224.8026 dengan probability  $0,0000 < 0.05$  atau terima H1 yang berarti residual berdistribusi tidak normal.



**2. Uji Multikolinieritas**

Pengujian Multikolinieritas penelitian bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variable independen. Untuk melihat ada atau tidak nya korelasi antar variabel independen dilakukan covariance analisis. Dua buah variabel dikatakan tidak memiliki kolinieritas apabila nilai korelasinya kurang dari 10.

Terlihat hasil pengolahan data nilai centered VIF untuk X1 adalah 1,455223, X2 adalah 1,295396, X3 adalah 1,053506 dan X4 adalah 1,216433. Nilai centered VIF kurang dari 10, artinya tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model penelitian ini.

**Uji Multikolinieritas**

Variance Inflation Factors  
 Date: 04/02/22 Time: 20:07  
 Sample: 1 135  
 Included observations: 135

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	3.251101	12.94904	1.455223
X2	0.553778	3.253200	1.295396
X3	0.191436	1.730302	1.053506
X4	7.675085	28.35063	1.216433
C	0.000763	49.14820	NA

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan, atau yang lain. Bila varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap makad isebut Homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Untuk melihat ada tidaknya masalah heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan dengan uji Breusch Pagan Godfrey. Jika p-value obs\*- square <  $\alpha$ , maka dapat diyakini bahwa dalam model regresi terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya jika p-value obs\*-square >  $\alpha$ , maka dapat dipastikan bahwa dalam model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.417949	Prob. F(4,130)	0.7955
Obs*R-squared	1.714052	Prob. Chi-Square(4)	0.7882
Scaled explained SS	4.972971	Prob. Chi-Square(4)	0.2901

Test Equation:  
 Dependent Variable: RESID^2  
 Method: Least Squares  
 Date: 04/02/22 Time: 20:15  
 Sample: 1 135  
 Included observations: 135

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.003368	0.003084	1.092179	0.2768
X1	-0.020655	0.201309	-0.102603	0.9184
X2	0.078383	0.083084	0.943423	0.3472
X3	-0.003363	0.048849	-0.068840	0.9452
X4	-0.236636	0.309307	-0.765053	0.4456

R-squared	0.012697	Mean dependent var	0.002018
Adjusted R-squared	-0.017682	S.D. dependent var	0.005066
S.E. of regression	0.005111	Akaike info criterion	-7.678703
Sum squared resid	0.003395	Schwarz criterion	-7.571100
Log likelihood	523.3124	Hannan-Quinn criter.	-7.634976
F-statistic	0.417949	Durbin-Watson stat	2.086785
Prob(F-statistic)	0.795462		

Karena p probability chi square pada obs\*R-square adalah 0,7882 > 0,05, dapat diyakini bahwa didalam model regresi yang di teliti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Kesimpulannya adalah dengan tingkat keyakinan 95%, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

• **Persamaan Regresi**

Berdasarkan hipotesis yang diajukan ada 4 (empat) variabel eksplanatori yang mempengaruhi pengelolaan dana desa (variabel terikat atau Y) yaitu: Rasio Penduduk (X1), Rasio Penduduk Miskin (X2), Rasio Luas Wilayah (X3) dan Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) (X4). Hasil run data menggunakan Eviews 8 tampak pada table berikut ini.

**Persamaan Regresi**

Dependent Variable: LOG_Y					
Method: Least Squares					
Date: 04/02/22 Time: 19:44					
Sample: 1 135					
Included observations: 135					
Variable	Coefficien	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	6.608440	1.803081	3.665082	0.0004	
X2	5.662187	0.744162	7.608806	0.0000	
X3	2.525884	0.437534	5.772999	0.0000	
X4	4.337280	2.770394	1.565582	0.1199	
C	8.747761	0.027619	316.7333	0.0000	
R-squared	0.582644	Mean dependent var	8.889493		
Adjusted R-squared	0.569803	S.D. dependent var	0.069788		
S.E. of regression	0.045774	Akaike info criterion	-3.293879		
Sum squared resid	0.272380	Schwarz criterion	-3.186277		
Log likelihood	227.3369	Hannan-Quinn criter.	-3.250153		
F-statistic	45.37123	Durbin-Watson stat	1.950274		
Prob(F-statistic)	0.000000				

Berdasarkan hasil olahan data menunjukkan bahwa persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Log Y} = 8,747761 + 6,608440 X1 + 5,662187 X2 + 2,52884 X3 + 4,337280 X4 + \epsilon$$

Interpretasi hasil olahan data :

1. Secara parsial X1, X2 dan X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun X4 tidak signifikan mempengaruhi Y.
2. Secara bersama-sama X1, X2, X3 dan X4 berpengaruh secara signifikan terhadap Y.
3. Hubungan X1, X2, X3 dan X4 bersifat positif terhadap Y artinya jika terjadi peningkatan pada variabel bebas akan meningkatkan variabel terikat.
4. Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap Y adalah X1.
5. Nilai r = 0,582644 menunjukkan bahwa hubungan X1,X2,X3 dan X4 dengan Y adalah sebesar 58,26 %.
6. Nilai R = 0,569803, artinya variasi perubahan X1,X2, X3 dan X3 56,98 % mempengaruhi perubahan Y, sisanya dipengaruhi oleh perubahan variable lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

### Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Desa

Efektifitas 135 desa di kabupaten minahasa tenggara jika di lihat menurut rata-rata skor efektivitas per Kecamatan :

#### Rata-rata skor efektivitas menurut kecamatan di kabupaten minahasa tenggara

No	Kecamatan	Rata-Rata Skor Efektifitas	Kualitas Efektivitas
1	Ratahan	88,42	Sangat Efektif
2	Pusomaen	96,58	Sangat Efektif
3	Belang	98,24	Sangat Efektif
4	Ratatotok	95,35	Sangat Efektif
5	Tombatu	96,36	Sangat Efektif
6	Touluaan	96,42	Sangat Efektif
7	Touluaan Selatan	96,79	Sangat Efektif
8	Silian Raya	98,48	Sangat Efektif
9	Tombatu Timur	98,08	Sangat Efektif
10	Tombatu Utara	96,93	Sangat Efektif
11	Pasan	97,09	Sangat Efektif
12	Ratahan Timur	98,45	Sangat Efektif
	<b>Minahasa Tenggara</b>	<b>97,17</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Data menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan dana desa di kabupaten minahasa tenggara berada pada kondisi Sangat Efektif dengan skor 97,17%. Menurut kecamatan masih terdapat 1 (satu) desa yang pengelolaan dana desanya masih berstatus efektif yaitu desa ratatotok dua di kecamatan ratatotok

Jika kualitas efektifitas pengelolaan dana desa menurut 135 desa di kabupaten minahasa tenggara secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

#### Kualitas efektifitas pengelolaan dana desa di kabupaten minahasa tenggara

Kualitas Efektivitas	Jumlah Desa
Sangat Efektif	134
Efektif	1
Cukup Efektif	0
Kurang Efektif	0
Sangat Kurang Efektif	0

Rata-rata jumlah dana desa yang diterima 135 desa tahun 2021 mencapai Rp.786.036.267. Terdapat 13 desa yang menerima dana desa diatas 1 miliar rupiah yaitu desa rasi, desa wiau, desa borgo, desa molompar, desa ratatotok timur, desa soyoan, desa basaan dua, desa ratatotok tenggara, desa tombatu satu, desa lobo dua, desa silian selatan, desa liwutug, dan desa wongkai satu.

Data menunjukkan bahwa jumlah desa yang sudah sangat efektif dalam pengelolaan dana desa mencapai 134 desa (33 desa dengan persentase efektivitas 100%) dan terdapat desa yang masih berstatus efektif sejumlah 1 desa (yaitu desa ratatotok dua kecamatan ratatotok).

### **Pembahasan**

Dana desa dan pengelolaannya untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa dipengaruhi oleh rasio penduduk, rasio penduduk miskin, rasio luas wilayah dan rasio indeks kesulitan geografis (IKG).

Berdasarkan hasil penelitian untuk rasio penduduk ternyata memiliki persamaan dengan Fajar Pandu Pratama (2019) yang menyatakan bahwa kepadatan penduduk signifikan dan memiliki hubungan positif mempengaruhi alokasi belanja dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Magetan. Begitu juga dengan rasio penduduk miskin berpengaruh signifikan dan positif terhadap alokasi belanja dana desa.

Namun untuk indeks kesulitan geografis (IKG) hasil penelitian ini berbeda dengan Fajar (2019), karena hasil peneliti tidak signifikan karena nilai probabilitasnya adalah 0,1199. Sebaliknya Fajar membuktikan indeks kesulitan geografis (IKG) berpengaruh positif terhadap alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di kabupaten minahasa tenggara. Analisis efektivitas pengelolaan dana desa yang masih kurang efektif, sehingga perlu diefektifkan dengan adanya teknologi dan informasi atau sistem pengelolaan keuangan desa secara online.

Sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa kepada publik dan dalam menjaga akuntabilitas keuangan desa, pemerintah desa di kabupaten minahasa tenggara di dukung dengan pemanfaatan beberapa aplikasi dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan, berupa sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang terintegrasi secara online di 135 (seratus tiga puluh lima) desa di kabupaten minahasa tenggara serta didukung dengan pemanfaatan aplikasi perbankan (KASDA ONLINE).

Dalam konteks pemberdayaan, beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan desa antara lain ;

- Penguatan Usaha Pengembangan Ekonomi Produktif

- Pemenuhan kebutuhan dasar terutama di bidang pendidikan kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, kebutuhan gizi, maupun sarana dan prasarana fisik sesuai kebutuhan
- Pelestarian pranata dan kearifan lokal
- Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya/kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya dengan tujuan agar dengan kekuatan/keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri.

Paling tidak ada dua sasaran pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu :

1. Sasaran pertama terlepasnya mereka dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, sasaran ini terkait dengan problem pangan, sandang, papan atau perumahan dan kesehatan.
2. Sementara sasaran kedua adalah semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial ekonomi dan kekuasaan.

Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, sehingga mencapai tujuan yakni kemandirian baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik, maka proses pemberian daya harus menempatkan mereka sebagai subjek atau aktor dan bukan sebagai obyek pembangunan.

Dalam hubungan ini berbagai masukan, saran atau usulan masyarakat dalam menggali gagasan merupakan dasar atau titik pijak dari setiap program pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Tugas pemberdaya, yakni pemerintah baik pusat maupun daerah serta pihak pemberdaya lainnya adalah memfasilitasi untuk mengkaji di desa, kebutuhan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah mereka. Sebagai fasilitator pemerintah dan pihak pemberdaya lainnya harus memampukan mereka sehingga mereka mengenali akar permasalahan yang dihadapi dan memahami bagaimana cara efektif untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Dengan perpaduan antara berbagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan partisipasi masyarakat dalam suatu mekanisme yang baik maka niscaya pembangunan desa akan dapat berhasil dalam rangka mempercepat proses pencapaian desa swasembada atau kemandirian desa (Sajogyo & Sajogyo P., 2007)

Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat, yang didalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Sementara sasaran pembaharuan adalah desa, sebagai sebuah

entitas kolektif yang mengandung proses relasi ekonomi-politik antar aktor di desa, governance system dalam desa maupun relasi atau posisi ekonomi-politik desa di hadapan struktur supradesa yang lebih tinggi. Pembaharuan desa adalah sebuah upaya yang berkelanjutan untuk mengawal perubahan relasi ekonomi-politik desa secara internal maupun eksternal, menuju tatanan kehidupan desa baru yang lebih demokratis, mandiri dan adil. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal, yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaharuan menuju kemandirian desa (Purnomo, 2011).

Namun beberapa hal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana desa di kabupaten minahasa tenggara, bahwa dana desa menjadi trigger (pemicu) atau dana stimulan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta upaya meningkatkan pendapatan desa melalui PAD.

Dua Bidang yang menjadi fokus dalam pengelolaan Dana Desa yaitu:

- Bidang Pembangunan, dimana bidang pembangunan diharapkan dapat membuka lapangan kerja dimasyarakat desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap / pengangguran dan tergolong sebagai masyarakat miskin. Dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Bidang Pemberdayaan melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif Berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu, diharapkan dapat menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu, Bernilai ekonomi dan Berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui Pemberdayaan BUM Desa, Pengembangan produk unggulan desa atau kawasan perdesan, prioritas usaha pada pengelolaan Sumber Daya Alam, Industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal, pelayanan publik, jaringan distribusi, dan sektor keuangan.

Kegiatan yang dapat ditunjang melalui Dana Desa pada bidang Pemberdayaan antara lain :

Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, yang terbagi atas sub bidang :

- 1) Kelautan dan Perikanan :
  - a) Pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
  - b) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
  - c) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba/kolam perikanan darat milik desa;\*
  - d) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;\*
  - e) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst); dan
  - f) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan.\*
- 2) Pertanian dan peternakan :
  - a) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
  - b) Peningkatan produksi pertanian (alat produksi dan pengolahan pertanian, penanganan pasca panen, dll);
  - c) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll);
  - d) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana; dan
  - e) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan.\*
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur desa :
  - a) Peningkatan kapasitas kepala desa;
  - b) Peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
  - c) Peningkatan kapasitas BPD.
- 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga :
  - a) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
  - b) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak; dan
  - c) Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas).
- 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah :
  - a) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD/ UMKM;
  - b) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
  - c) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non-pertanian.
- 6) Dukungan penanaman modal :
  - a) Pembentukan BUMDesa/persiapan dan pembentukan awal BUMDesa); dan
  - b) Pelatihan pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa).
- 7) Perdagangan dan perindustrian :
  - a) Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;

- b) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;\*
- c) Pengembangan industri kecil level desa; dan
- d) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).\*

Kondisi ideal dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dijelaskan seperti penjelasan diatas namun kondisi yang terjadi di kabupaten minahasa tenggara masih belum dalam kondisi ideal, dimana dana desa diharapkan mampu menjadi pemicu dalam meningkatkan pendapatan di desa melalui PAD yang pada kenyataannya PAD yang dihasilkan belum mampu menjadi penopang dalam menunjang belanja operasional pemerintah di desa, besarnya pada tahun 2021 hanya berkisar diangkat 0,39 - 1 % dari total Dana Desa yang diterima oleh setiap desa.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### Kesimpulan

1. Secara parsial terdapat pengaruh signifikan dan memiliki hubungan positif baik untuk rasio penduduk, rasio penduduk miskin dan rasio luas wilayah terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sebaliknya secara parsial rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.
2. Secara bersama-sama rasio penduduk, rasio penduduk miskin, rasio luas wilayah dan rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Dengan pengaruh terbesar adalah rasio penduduk terhadap pengelolaan dana desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Variasi perubahan efektifitas pengelolaan dana desa 97,17 % disebabkan oleh variasi perubahan keempat variable bebas yang dipilih dalam penelitian ini. Kualitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa Tenggara masih berada pada level Cukup Efektif. Terdapat 47 desa maju dilihat dari indeks desa membangun, namun tingkat efektifitas pengelolaan dana desa masih harus ditingkatkan.

##### Saran

1. Monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan sampai ke level efektifitas pengelolaan dana desa dibandingkan dengan kinerja desa.
2. Untuk mewujudkan kemandirian desa atau eksistensi desa perlu stimulan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi desa.

3. Peningkatan sistem kas desa online Bank SulutGo sampai ke monitoring dan evaluasi.
4. Meningkatkan Pengelolaan Aset Desa sebagai salah satu faktor penting dalam menunjang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih baik lagi di Kabupaten Minahasa Tenggara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32.
- Anggraini, Putri Kartika. 2015. “Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014”. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Ayu Diah Amalia dan M. Syawie. 2015. Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. Jakarta
- Arjuna Pinilas, Anderson G Kumenaung, Ita P Rorong. 2019. Pengaruh Dana Desa terhadap Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 19 No. 03 Tahun 2019. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Debby D Mautang, Rosalina AM Koleangan, George MV Kawung. 2021. JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH. Vol.19 No.4. 2021/2/24 .  
[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=awwqnvQAAAAJ&citation\\_for\\_view=awwqnvQAAAAJ:kNdYIX-mwKoC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=awwqnvQAAAAJ&citation_for_view=awwqnvQAAAAJ:kNdYIX-mwKoC)
- Emzir. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data. Depok: PT Rajagrafindo Indonesia.
- Hanif N. (2011). Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga Juardi, Muchlis dan Putri. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban.  
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/5159>
- Husna, Saifatul dan Syukriy Abdullah. 2016. “Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie)”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 282-293.
- Irfan Sofi, Kurnia, Misra, Hendrocahyo, Agus Sunarya Sulaeman, Nur Afyah Maizunati. 2021. Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi dan Keuangan Daerah (Defis) Edisi 8, Volume VIII,

- Januari-Juni 2021. ISSN 2599-0284. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page\\_id=4798](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=4798)
- Jensen, M dan Smith Jr. 1984. *The modern theory of corporate finance*. New York: McGraw-Hill.
- Juwaini, Akram dan Husnan. (2018). Optimization Of Village Financial System (Siskeudes) For Village Financial Administration (Case Study In Dompu Village Government, Indonesia). *International Journal of Economic, Commerce & Management*. <http://ijecm.co.uk/volume-vi-issue-7/>.
- Kementerian Keuangan RI. 2019. *Buku Pintar Dana Desa Cetakan Kedua*. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI : 33-44. [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-REVISI\\_1-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-REVISI_1-1.pdf)
- Kementerian Keuangan RI. 2020. *Pedoman Pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TKDD 2020*. Jakarta. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/09/Buku-Pedoman-Pelaksanaan-TKDD-2020-update.pdf>
- Manila, I. GK 1996. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Morenly Marchel Welley, Rosalina A.M. Koleangan, George M.V. Kawung. 2018. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.4 2021/2/24* [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=awwqnvQAAA&AJ&citation\\_for\\_view=awwqnvQAAA&AJ:3fE2CSJrl8C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=awwqnvQAAA&AJ&citation_for_view=awwqnvQAAA&AJ:3fE2CSJrl8C)
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3. R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Putra, Chandra Kusuma, dkk. 2013. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1203- 1212.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rosalinda, Okta. 2014. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan". Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Stoner, James A.F. (2006). Management. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.hlm.43.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- Sujarweni, V. W. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Setyawan, Priyono dan Iswanaji. (2017). Development Model of E-Budgeting and E-Reporting System on the Management of Village Fund Finance. Jurnal Dinamika akuntansi.  
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/12000>.
- Syaifullah dan Burhanuddin. (2018). Implementation of SISKEUDES Based on Top Management Support and Education and Training. International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology.  
<http://ijsrcseit.com/CSEIT183168>.
- Salindeho, Kalangi dan Warongan. Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill".  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/17420>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widjaja, A.W. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat, dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.2018 [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id),

Kertas Kerja Perhitungan Dana Desa Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Indeks Kesulitan Geografis					IKG	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot	Bobot
1	Ratahan	Rasi	3	641.574.000	MAJU	4	-	55	55,07914137	1	288.153.000	1.332	0,012470859	0,001247086	59	0,007334659	0,00293386	5	0,00751594	0,001503187	30	0,006491019	0,00194731	0,007631443	184.591.000	1.114.318.000	
2	Ratahan	Rasi Satu	3	641.574.000	MAJU	3	-	48	48,05274216	23	-	1.248	0,011684409	0,001168441	36	0,004475385	0,00179015	2	0,00278716	0,000557432	31	0,006830278	0,00204908	0,00556551	134.610.000	776.184.000	
3	Pusomaen	Tatengesan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	38	37,8785739	97	-	632	0,005917104	0,00059171	54	0,006713078	0,00268523	3	0,00408853	0,000817706	29	0,006325307	0,00189759	0,00599224	144.942.000	706.516.000	
4	Pusomaen	Wiau	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	51	50,78630771	7	288.153.000	418	0,003913528	0,000391353	8	0,00099453	0,00039781	11	0,01635412	0,003270824	45	0,009894854	0,00296846	0,007028445	170.006.000	1.019.733.000	
5	Pusomaen	Bentenan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	30	30,14262489	123	-	852	0,007976856	0,000797686	53	0,006588762	0,0026355	4	0,00571522	0,001143043	42	0,00926321	0,00277896	0,007355197	177.909.000	739.483.000	
6	Pusomaen	Tumbak	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	35	35,45238213	107	-	1.132	0,010598358	0,001059836	171	0,021258081	0,00850323	50	0,011024333	0,0033073	50	0,011024333	0,0033073	0,0129532	313.315.000	954.889.000	
7	Pusomaen	Makalu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	45	44,62512686	61	-	650	0,006085629	0,000608563	39	0,004848334	0,00193933	3	0,0043612	0,00087222	45	0,00981235	0,0029437	0,006363821	153.930.000	715.504.000	
8	Pusomaen	Minanga	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	43	43,13096651	71	-	650	0,006085629	0,000608563	44	0,005469915	0,00218797	2	0,00305277	0,000610554	36	0,007798157	0,00233945	0,00574653	138.999.000	700.573.000	
9	Pusomaen	Minanga Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	34	33,95742023	117	-	586	0,005486429	0,000548643	6	0,000745898	0,00029836	4	0,00530916	0,001061833	35	0,007735233	0,00232057	0,004229405	102.302.000	663.876.000	
10	Pusomaen	Bentenan Indah	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	44	43,9991849	67	-	513	0,004802966	0,000480297	55	0,006837394	0,00273496	2	0,00327082	0,000654165	40	0,008721766	0,00261653	0,006485949	156.884.000	718.458.000	
11	Pusomaen	Minanga Timur	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	39	39,16077385	89	-	467	0,004372291	0,000437229	31	0,003853804	0,00154152	3	0,00457915	0,000915831	35	0,00761276	0,00228383	0,005178409	125.257.000	686.831.000	
12	Pusomaen	Minanga Dua	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	43	43,2381352	69	-	658	0,00616053	0,000616053	32	0,00397812	0,00159125	2	0,00227536	0,000455071	43	0,009287496	0,00278625	0,005448621	131.793.000	693.367.000	
13	Pusomaen	Minanga Tiga	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	33	32,93486742	121	-	389	0,003642015	0,000364202	27	0,003356539	0,00134262	1	0,00113768	0,000227536	44	0,00959727	0,00286792	0,004802271	116.159.000	677.733.000	
14	Pusomaen	Makalu Selatan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	30	29,96704925	124	-	816	0,007639806	0,000763981	46	0,005718548	0,00228742	1	0,00218055	0,00043621	41	0,008875494	0,00266265	0,006150158	148.762.000	710.336.000	
15	Pusomaen	Tatengesan Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	45	45,20621501	56	-	808	0,007564906	0,000756491	57	0,007086027	0,00283441	3	0,00408853	0,000817706	45	0,009843776	0,00295313	0,00736174	178.068.000	739.642.000	
16	Pusomaen	Bentenan Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	47	46,66474435	58	-	628	0,005879654	0,000587965	47	0,005842864	0,00233715	0	0,00043393	8,678666e-05	46	0,009949643	0,00298489	0,005996791	145.052.000	706.626.000	
17	Pusomaen	Tumbak Madani	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	42	41,62769588	79	-	553	0,005177466	0,000517747	55	0,006837394	0,00273496	0	0,00029452	5,890325e-05	41	0,00895394	0,00268618	0,005997789	145.076.000	706.650.000	
18	Belang	Mangkit	2	561.574.000	MAJU	4	-	14	14,42039495	125	-	751	0,007031243	0,000703124	87	0,010815515	0,00432621	7	0,01035761	0,002071522	31	0,006839651	0,0020519	0,009152748	221.389.000	782.963.000	
19	Belang	Borgo	3	641.574.000	MAJU	7	-	49	48,2848005	124	288.153.000	1.107	0,010364295	0,00103643	267	0,03192442	0,01327698	8	0,01237667	0,002475373	32	0,00703237	0,00210971	0,01889849	457.122.000	1.386.849.000	
20	Belang	Belang	3	641.574.000	MAJU	4	-	40	39,59153771	87	-	1.398	0,013088785	0,001308878	73	0,009075087	0,00363003	4	0,00547129	0,001094258	22	0,004880689	0,00146421	0,007497378	181.349.000	822.923.000	
21	Belang	Buku	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	42	41,95344145	77	-	999	0,009353144	0,000935314	56	0,006961711	0,00278468	3	0,00436542	0,000873084	36	0,007789466	0,00233684	0,006929923	167.623.000	729.197.000	
22	Belang	Beringin	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	36	36,41194377	103	-	447	0,004185041	0,000418504	60	0,007458976	0,00298359	9	0,0130833	0,002616659	37	0,008130866	0,00243926	0,008458013	204.585.000	766.159.000	
23	Belang	Tababo	2	561.574.000	MAJU	3	-	46	45,72640511	51	-	867	0,008117293	0,000811729	50	0,006215823	0,00248633	5	0,00764891	0,001529782	23	0,005096203	0,00152886	0,006356698	153.757.000	715.331.000	
24	Belang	Watuliny	2	561.574.000	MAJU	2	-	35	34,94972962	110	-	848	0,007939406	0,000793941	34	0,004226753	0,0016907	6	0,00837482	0,001674964	31	0,006665615	0,00199968	0,00615929	148.983.000	710.557.000	
25	Belang	Molompur	3	641.574.000	MAJU	4	-	51	50,7267365	84	288.153.000	1.112	0,010411108	0,001041111	86	0,010691398	0,00427468	4	0,00596704	0,001193409	21	0,004665854	0,00139976	0,007910755	191.347.000	1.121.074.000	
26	Belang	Buku Utara	2	561.574.000	MAJU	5	-	46	45,67647851	54	-	929	0,008697769	0,000869777	100	0,012431626	0,00497265	1	0,0014262	0,000285239	23	0,005039013	0,0015117	0,007639371	184.783.000	746.357.000	
27	Belang	Buku Selatan	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	46	46,25537432	44	-	541	0,005065116	0,000506512	49	0,006091497	0,00243966	0	0,00071985	0,00014397	36	0,007970953	0,00239129	0,005478366	132.512.000	694.086.000	
28	Belang	Watuliny Tenggara	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	8	8,383279249	135	-	681	0,006375867	0,000637587	47	0,005842864	0,00233715	2	0,00355295	0,000710591	36	0,007865885	0,00235977	0,006045089	146.220.000	707.794.000	
29	Belang	Watuliny Indah	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	34	33,92071865	118	-	772	0,007227855	0,000722786	42	0,005211283	0,00208851	3	0,00456808	0,000913617	33	0,007254311	0,00217629	0,005901209	142.740.000	704.314.000	
30	Belang	Molompur Utara	2	561.574.000	MAJU	3	-	43	43,40696094	65	-	968	0,009062907	0,000906291	45	0,005594232	0,00232769	3	0,00437583	0,000875166	32	0,006944072	0,00208322	0,006102371	147.606.000	709.180.000	
31	Belang	Molompur Timur	2	561.574.000	MAJU	5	-	44	44,10813149	65	-	803	0,007518093	0,000751809	108	0,018426156	0,00537046	3	0,00437583	0,000875166	35	0,007544812	0,00226344	0,009260882	224.005.000	785.579.000	
32	Belang	Tababo Selatan	2	561.574.000	MAJU	4	-	37	36,84508453	101	-	839	0,007855143	0,000785514	67	0,008329189	0,00333168	4	0,00652466	0,001304932	31	0,006774806	0,00203244	0,007454564	180.313.000	741.887.000	
33	Belang	Buku Tengah	2	561.574.000	MAJU	3	-	35	35,18452543	109	-	820	0,007677256	0,000767726	55	0,006837394	0,00273496	3	0,00436578	0,000871355	20	0,004447175	0,00133415	0,005708191	138.071.000	699.645.000	
34	Belang	Ponosakan Indah	2	561.574.000	MAJU	2	-	39	38,59338	92	-	477	0,004465916	0,000446592	20	0,002486325	0,00099453	1	0,000997241	0,000194481	35	0,007618137	0,00228544	0,003921044	94.843.000	656.417.000	
35	Belang	Buku Tenggara	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	45	45,16050086	57	-	661	0,006188617	0,000618862	31	0,00189681	0,000154152	1	0,00189681	0,000379362	29	0,006429957	0,00192899	0,004468732	108.091.000		

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(16)+(21)	(26)	(27) = (3)+(8)+(12)+(2)
50	Ratatotok	Ratatotok Tengah	2	561.574.000	MAJU	3	-	40	40,01443954	86	-	706	0,00660993	0,000660993	43	0,005345599	0,00213824	1	0,00090354	0,000180709	24	0,005152775	0,00154583	0,004525774	109.471.000	671.045.000
51	Ratatotok	Ratatotok	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47,85830658	26	-	902	0,008444981	0,000844981	37	0,004599702	0,00183988	5	0,00768011	0,001536022	15	0,003374127	0,00101224	0,005232639	126.568.000	688.142.000
52	Ratatotok	Ratatotok Muara	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	47,87974388	25	-	652	0,006104355	0,000610435	77	0,009572352	0,00382894	3	0,00464801	0,000929603	32	0,007066345	0,0021199	0,007488882	181.143.000	742.717.000
53	Tombatu	Tonsawang	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	48	48,16832681	22	-	909	0,008510519	0,000851052	97	0,012058677	0,00482347	24	0,03626349	0,007252697	41	0,008956287	0,00268689	0,015614106	377.678.000	939.252.000
54	Tombatu	Betelan	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	35	35,3913348	108	-	983	0,009203344	0,000920334	73	0,009075087	0,00363003	3	0,00433929	0,000867859	39	0,008556079	0,00256682	0,007985052	193.145.000	754.719.000
55	Tombatu	Tombatu Satu	3	641.574.000	MAJU	7	-	47	47,21349849	34	-	1.764	0,016515462	0,001651546	234	0,029090005	0,011636	18	0,02755124	0,005510249	34	0,007384186	0,00221526	0,021013053	508.269.000	1.149.843.000
56	Tombatu	Kali	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	43	42,98301724	73	-	909	0,008510519	0,000851052	51	0,006340129	0,00253605	6	0,00915831	0,001831662	36	0,007757843	0,00232735	0,007546118	182.527.000	744.101.000
57	Tombatu	Pisa	2	561.574.000	TERTINGGAL	2	-	34	34,10068091	115	-	313	0,002930465	0,000293046	49	0,006091497	0,0024366	25	0,03815962	0,007631923	53	0,011676178	0,00350285	0,013864422	335.356.000	896.930.000
58	Tombatu	Tombatu	2	561.574.000	MAJU	3	-	34	34,15655084	113	-	849	0,007948768	0,000794877	27	0,003356539	0,00134262	27	0,04143044	0,008286088	33	0,007204746	0,00216142	0,012585004	304.409.000	865.983.000
59	Tombatu	Betelan Satu	3	641.574.000	BERKEMBANG	6	-	47	46,86421003	37	-	1.624	0,015204711	0,001520471	182	0,022625559	0,00905022	0	0,00029437	5,88748E-05	34	0,007350626	0,00220519	0,012834758	310.451.000	952.025.000
60	Tombatu	Kali Oki	2	561.574.000	MAJU	2	-	47	46,65109492	39	-	952	0,008913107	0,000891311	21	0,002610641	0,00104426	3	0,00379416	0,000758831	34	0,007331434	0,00219943	0,004893829	118.373.000	679.947.000
61	Tombatu	Tombatu Tiga Sel	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	43	42,90537888	75	-	857	0,008023668	0,000802367	21	0,002610641	0,00104426	0	0,0002275	4,55004E-05	36	0,007944429	0,00239233	0,004284453	103.633.000	665.207.000
62	Tombatu	Tombatu Tiga Tim	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	44	44,46391812	62	-	681	0,006375867	0,000637587	67	0,008329189	0,0033168	1	0,00163801	0,000327603	31	0,006848202	0,00205446	0,006351326	153.628.000	715.202.000
63	Tombatu	Tonsawang Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	46	45,88275486	49	-	570	0,005336629	0,000533663	59	0,007334659	0,00293386	37	0,05640987	0,011281973	41	0,008871798	0,00266154	0,01741104	421.143.000	982.717.000
64	Touluaan	Ranoketang Atas	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	39	38,99351481	91	-	810	0,007583631	0,000758363	45	0,005594232	0,00223769	3	0,00401106	0,000802212	32	0,006990852	0,00209726	0,005895523	142.602.000	704.176.000
65	Touluaan	Tondanauw	2	561.574.000	MAJU	4	-	48	48,22844733	21	-	850	0,007958131	0,000795813	62	0,007707608	0,00308304	7	0,01105703	0,002211406	31	0,006748824	0,00202465	0,00811491	196.286.000	757.860.000
66	Touluaan	Lobu Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	34	34,08327502	116	-	788	0,007377655	0,000737766	43	0,005345599	0,00213824	7	0,01104569	0,002209138	32	0,006937542	0,00208126	0,007166406	173.343.000	734.917.000
67	Touluaan	Lobu Dua	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	52	51,54348005	5	288.153.000	1.141	0,01068262	0,001068262	78	0,009696668	0,00387867	13	0,01887014	0,003774028	31	0,00676145	0,00202843	0,010749392	260.009.000	1.189.736.000
68	Touluaan	Tondanouw Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	44	44,07933368	66	-	488	0,004568903	0,00045689	57	0,00786027	0,00283441	7	0,01090275	0,002180549	33	0,007135765	0,00214073	0,00916258	184.135.000	745.709.000
69	Touluaan	Toundanouw Atas	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	48	48,48298372	16	-	604	0,005654954	0,000565495	80	0,00945301	0,00397812	8	0,01238388	0,00247675	33	0,007117234	0,00213517	0,007615561	221.457.000	783.031.000
70	Touluaan	Ranoketang Atas	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	9	8,21477951	131	-	754	0,00705933	0,000705933	34	0,004226753	0,0016907	2	0,00303212	0,000606423	29	0,006249664	0,00187499	0,004878047	117.991.000	675.565.000
71	Touluaan	Lobu Kota	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	48	47,83385737	27	-	592	0,005542604	0,00055426	38	0,004724018	0,00188961	3	0,00501474	0,001002949	33	0,007261824	0,00217855	0,005625364	136.068.000	697.642.000
72	Touluaan	Lobu Atas	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	38	38,45548405	93	-	578	0,005411529	0,000541153	49	0,006091497	0,0024366	2	0,00247423	0,000494847	29	0,006288514	0,00188655	0,005359153	129.629.000	691.203.000
73	Touluaan	Lobu	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	37	37,42713623	98	-	965	0,009034819	0,000903482	46	0,005718548	0,00228742	4	0,00566204	0,00122208	36	0,007818808	0,00234564	0,006688752	161.306.000	722.880.000
74	Touluaan Selatar	Kalait	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	49	48,81611818	12	288.153.000	512	0,004793604	0,00047936	40	0,00497265	0,00198906	2	0,0025701	0,000514021	34	0,007441632	0,00232349	0,005214931	126.140.000	975.867.000
75	Touluaan Selatar	Kalait Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	34	34,15093823	114	-	618	0,005786029	0,000578603	86	0,010691198	0,00427648	2	0,00238652	0,000477305	35	0,010471604	0,00314148	0,008473869	204.866.000	766.542.000
76	Touluaan Selatar	Kalait Dua	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	38	37,98201979	96	-	661	0,006188617	0,000618862	40	0,00497265	0,00198906	2	0,00238652	0,000477305	46	0,010116512	0,00303495	0,006236753	150.956.000	712.430.000
77	Touluaan Selatar	Kalait Tiga	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	8	8,409800463	134	-	428	0,004007153	0,000400715	69	0,008577822	0,00343113	4	0,00570242	0,001140484	46	0,010135436	0,00304063	0,008012958	193.820.000	755.394.000
78	Touluaan Selatar	Lowatag	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	9	9,021308976	130	-	369	0,003454765	0,000345477	71	0,008826455	0,00353058	38	0,05693415	0,011386829	42	0,009190124	0,00275704	0,018019925	435.871.000	997.445.000
79	Touluaan Selatar	Bunag	2	561.574.000	BERKEMBANG	5	-	43	43,28356788	70	-	626	0,005860929	0,000586093	98	0,01282994	0,0048732	6	0,0087222	0,00174444	48	0,010522846	0,00315685	0,010360584	250.605.000	812.179.000
80	Touluaan Selatar	Banga	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	33	33,24190359	119	-	222	0,002078477	0,000207848	48	0,005967181	0,00238687	9	0,0130833	0,002616659	51	0,011037704	0,00331131	0,00852269	206.149.000	767.723.000
81	Touluaan Selatar	Tambelang	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	10	9,601886396	129	-	799	0,007480643	0,000748064	66	0,008204873	0,00328195	7	0,01101177	0,002202355	32	0,006918508	0,00207555	0,008307921	200.954.000	762.528.000
82	Touluaan Selatar	Ranoako	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	36	36,22231343	104	-	442	0,004138228	0,000413823	47	0,005842864	0,00233715	6	0,00926734	0,001853467	42	0,009139873	0,00274196	0,007346397	177.697.000	739.271.000
83	Touluaan Selatar	Suhuyon	2	561.574.000	TERTINGGAL	3	-	33	33,16715678	120	-	242	0,002265727	0,000226573	52	0,006444446	0,00258578	4	0,00551679	0,001103358	50	0,010919668	0,0032759	0,007191609	173.953.000	735.527.000
84	Silian Raya	Silian	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	42	42,33305926	76	-	638	0,005973279	0,000597328	52	0,006444446	0,00258578	1								

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afrimasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis			Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) - (15) x (18) x (21)	(26)	(27) - (9) x (10) x (12) x (3)
107	Tombatu Utara	Tombatu Dua Bar	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	47	47,18751205	35	-	1.144	0,010710708	0,001071071	77	0,009572352	0,00382894	2	0,00241131	0,000482262	39	0,008463938	0,00253918	0,007921455	191.606.000	833.180.000
108	Tombatu Utara	Tombatu Dua Ten	2	561.574.000	BERKEMBANG	2	-	51	50,93360125	6	288.153.000	920	0,008613506	0,000861351	26	0,003232223	0,00129289	0	0,00040448	8,089555-05	29	0,006266307	0,00187989	0,004115027	99.535.000	949.262.000
109	Tombatu Utara	Tombatu Tiga	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	46	45,71868872	53	-	1.023	0,009577845	0,000957784	52	0,006464446	0,00258578	7	0,01081772	0,002163545	40	0,008794121	0,00263824	0,008345344	201.859.000	843.433.000
110	Tombatu Utara	Tombatu Tiga Ten	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	47	46,55455177	41	-	567	0,005308541	0,000530854	14	0,001740428	0,00069617	0	0,000182	3,64003E-05	29	0,006441511	0,00193245	0,003195879	77.303.000	638.877.000
111	Tombatu Utara	Kuyanga	3	641.574.000	BERKEMBANG	4	-	45	45,15770128	4	-	1.127	0,010551545	0,001055155	74	0,009199403	0,00367976	3	0,0043611	0,00087222	29	0,006306356	0,00189191	0,007499043	181.389.000	822.963.000
112	Tombatu Utara	Kuyanga Satu	3	641.574.000	BERKEMBANG	3	-	47	47,26472983	32	-	1.227	0,011487796	0,00114878	53	0,006588762	0,0026355	3	0,00490624	0,000981247	27	0,005836438	0,00175093	0,006516463	157.622.000	799.196.000
113	Tombatu Utara	Winorangian	2	561.574.000	BERKEMBANG	3	-	14	13,69832444	126	-	982	0,009193982	0,000919398	48	0,005967181	0,00238687	10	0,01439305	0,00287861	30	0,006543025	0,00196291	0,008147788	197.081.000	758.655.000
114	Tombatu Utara	Winorangian Satu	2	561.574.000	MAJU	1	-	45	45,29172561	55	-	650	0,006085629	0,000608563	15	0,001864744	0,0007459	4	0,00550446	0,001100893	30	0,006561205	0,00196836	0,004423715	107.002.000	668.576.000
115	Pasan	Towuntu	2	561.574.000	MAJU	3	-	44	44,1905871	63	-	702	0,00657248	0,000657248	49	0,006091497	0,0024366	5	0,00725023	0,001450045	33	0,007161066	0,00214832	0,006692212	161.873.000	723.447.000
116	Pasan	Towuntu Timur	3	641.574.000	MAJU	3	-	47	47,40171598	30	-	1.115	0,010439195	0,00104392	53	0,006588762	0,0026355	6	0,00960532	0,001921064	18	0,003874879	0,00116246	0,006762952	163.584.000	805.158.000
117	Pasan	Towuntu Barat	2	561.574.000	MAJU	2	-	46	45,87101811	50	-	604	0,005654954	0,000565495	26	0,003232223	0,00129289	3	0,00432849	0,000865699	23	0,004981156	0,00149435	0,00421843	102.036.000	663.610.000
118	Pasan	Tolombukan	2	561.574.000	MAJU	1	-	41	40,93305785	81	-	843	0,007892593	0,000789259	4	0,000497265	0,00019891	2	0,0029028	0,000580561	30	0,006450161	0,00193505	0,003503774	84.750.000	646.324.000
119	Pasan	Tolombukan Satu	3	641.574.000	MAJU	2	-	34	34,45690642	112	-	1.159	0,010851146	0,001085115	27	0,003356339	0,00134262	2	0,00282381	0,000564762	34	0,00738291	0,00221487	0,005207366	125.957.000	767.531.000
120	Pasan	Tolombukan Bara	2	561.574.000	MAJU	1	-	47	46,89593873	36	-	337	0,003155165	0,000315516	14	0,001740428	0,00069617	1	0,00183989	0,000367978	34	0,007502052	0,00225062	0,003630281	87.810.000	649.384.000
121	Pasan	Liwutung	2	561.574.000	MAJU	5	-	49	48,69518454	13	288.153.000	528	0,004943404	0,00049434	95	0,011810045	0,00472402	0	0,00005702	0,000101403	30	0,006485866	0,00194576	0,007265521	175.740.000	1.025.467.000
122	Pasan	Liwutung Satu	2	561.574.000	MAJU	4	-	46	46,37454799	43	-	471	0,004409741	0,000440974	61	0,007583292	0,00303332	6	0,00937979	0,001875959	33	0,007161066	0,00214832	0,007498569	181.377.000	742.951.000
123	Pasan	Liwutung Dua	2	561.574.000	MAJU	1	-	38	38,44846733	94	-	510	0,004774879	0,000477488	5	0,000621581	0,00024863	0	0,0004708	9,41601E-05	35	0,007544418	0,00227233	0,003092606	74.805.000	636.379.000
124	Pasan	Poniki	2	561.574.000	BERKEMBANG	4	-	40	40,41784966	82	-	684	0,006403955	0,000640395	66	0,008204873	0,00328195	2	0,0031836	0,00063672	32	0,006894086	0,00206823	0,006627291	160.303.000	721.877.000
125	Pasan	Maulit	2	561.574.000	MAJU	4	-	46	46,48426667	42	-	799	0,007480643	0,000748064	78	0,009696668	0,00387867	2	0,00359791	0,000719581	33	0,007246107	0,00217383	0,007520145	181.899.000	743.473.000
126	Ratahan Timur	Wioi	2	561.574.000	MAJU	1	-	46	46,13081629	46	-	880	0,008239006	0,000823901	15	0,001864744	0,0007459	3	0,00458276	0,000916553	24	0,005327656	0,0015983	0,004084648	98.801.000	660.375.000
127	Ratahan Timur	Wioi Satu	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	40	40,23946847	84	-	599	0,005608142	0,000560814	14	0,001740428	0,00069617	3	0,00447099	0,000894198	38	0,008269412	0,00248082	0,004632006	112.040.000	673.614.000
128	Ratahan Timur	Wioi Dua	2	561.574.000	MAJU	1	-	39	39,1605104	90	-	437	0,004091416	0,000409142	3	0,000372949	0,00014918	3	0,00447099	0,000894198	38	0,008269412	0,00248082	0,003933342	95.141.000	656.715.000
129	Ratahan Timur	Wioi Tiga	2	561.574.000	MAJU	3	-	52	51,62952445	4	288.153.000	548	0,005130654	0,000513065	37	0,004599702	0,00183988	3	0,00502986	0,001005972	28	0,006077409	0,00182322	0,005182141	125.347.000	975.074.000
130	Ratahan Timur	Wioi Timur	2	561.574.000	BERKEMBANG	1	-	11	10,92524296	127	-	380	0,003557753	0,000355775	12	0,001491795	0,00059672	3	0,0040686	0,00081372	48	0,010577117	0,00317314	0,004939348	119.474.000	681.048.000
131	Ratahan Timur	Pangu	2	561.574.000	MAJU	1	-	43	42,90874561	74	-	726	0,006797118	0,000679718	5	0,000621581	0,00024863	3	0,00506348	0,001012695	31	0,006711989	0,0020136	0,003954643	95.656.000	657.230.000
132	Ratahan Timur	Pangu Satu	2	561.574.000	MAJU	1	-	48	47,94821258	24	-	787	0,007368293	0,000736829	12	0,001491795	0,00059672	2	0,00266157	0,000532314	32	0,00695581	0,00208674	0,003952604	95.607.000	657.181.000
133	Ratahan Timur	Pangu Dua	2	561.574.000	MAJU	2	-	36	35,80954256	106	-	688	0,006441405	0,00064414	30	0,003729488	0,0014918	2	0,00256715	0,000513429	34	0,007410161	0,00222305	0,004872413	117.855.000	679.429.000
134	Ratahan Timur	Wongkai	1	561.574.000	MAJU	1	-	10	10,37127679	128	-	713	0,006675467	0,000667547	12	0,001491795	0,00059672	5	0,00741221	0,001482442	37	0,008083258	0,00242498	0,005171684	125.094.000	686.668.000
135	Ratahan Timur	Wongkai Satu	2	561.574.000	MAJU	5	-	49	49,38775223	9	288.153.000	529	0,004952766	0,000495277	112	0,013923421	0,00556937	4	0,0057256	0,00114512	45	0,009778609	0,00293358	0,010143348	245.350.000	1.095.077.000
<b>Total</b>				<b>77.892.490.000</b>							<b>4.034.142.000</b>	<b>106.809.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10%</b>	<b>8.044.000</b>	<b>1.000</b>	<b>40%</b>	<b>663.606</b>	<b>1.000</b>	<b>20%</b>	<b>4.577.020</b>	<b>1.000</b>	<b>0.300</b>	<b>1.000</b>	<b>24.188.264.000</b>	<b>106.114.896.000</b>

Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kab./Kota ...	106.114.896.000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa	106.114.896.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota ...	77.892.490.000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Ko	77.892.490.000	-
Pagu Alokasi Afrimasi Kab./Kota ...	-	
Hasil Hitung Alokasi Afrimasi Kab./K	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota ...	4.034.142.000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./K	4.034.142.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota ...	24.188.264.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./	24.188.264.000	-
Jumlah Desa	135	
Jumlah Desa Penerima AK	14	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afrimasi DT	171.591.000
Alokasi Afrimasi DS	343.183.000
Alokasi Kinerja Per	288.153.000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000



**Skor Efektivitas Dana Desa di 135 Desa Per Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Rata-rata Skor Efektivitas	Rata-rata Skor Efektivitas Per Kecamatan	KUALITAS EFEKTIVITAS
(1)	(2)	(3)	(4)=5/4 * 100	(5)=5/4 * 100	(6)
1	Ratahan	Rasi	82,50	<b>88,42</b>	Sangat Efektif
2	Ratahan	Rasi Satu	94,34		Sangat Efektif
3	Pusomaen	Tatengesan	100,00	<b>96,58</b>	Sangat Efektif
4	Pusomaen	Wiau	94,93		Sangat Efektif
5	Pusomaen	Bentenan	99,16		Sangat Efektif
6	Pusomaen	Tumbak	88,28		Sangat Efektif
7	Pusomaen	Makalu	98,20		Sangat Efektif
8	Pusomaen	Minanga	96,04		Sangat Efektif
9	Pusomaen	Minanga Satu	91,94		Sangat Efektif
10	Pusomaen	Bentenan Indah	92,03		Sangat Efektif
11	Pusomaen	Minanga Timur	97,59		Sangat Efektif
12	Pusomaen	Minanga Dua	100,00		Sangat Efektif
13	Pusomaen	Minanga Tiga	100,00		Sangat Efektif
14	Pusomaen	Makalu Selatan	94,95		Sangat Efektif
15	Pusomaen	Tatengesan Satu	99,35		Sangat Efektif
16	Pusomaen	Bentenan Satu	100,00		Sangat Efektif
17	Pusomaen	Tumbak Madani	96,28		Sangat Efektif
18	Belang	Mangkit	96,65	<b>98,24</b>	Sangat Efektif
19	Belang	Borgo	96,93		Sangat Efektif
20	Belang	Belang	100,00		Sangat Efektif
21	Belang	Buku	87,64		Sangat Efektif
22	Belang	Beringin	97,35		Sangat Efektif
23	Belang	Tababo	100,00		Sangat Efektif
24	Belang	Watuliney	100,00		Sangat Efektif
25	Belang	Molompar	98,40		Sangat Efektif
26	Belang	Buku Utara	100,00		Sangat Efektif
27	Belang	Buku Selatan	99,06		Sangat Efektif
28	Belang	Watuliney Tengah	97,77		Sangat Efektif

29	Belang	Watuliney Indah	96,15		Sangat Efektif
30	Belang	Molompar Utara	100,00		Sangat Efektif
31	Belang	Molompar Timur	99,94		Sangat Efektif
32	Belang	Tababo Selatan	100,00		Sangat Efektif
33	Belang	Buku Tengah	98,80		Sangat Efektif
34	Belang	Ponosakan Indah	99,69		Sangat Efektif
35	Belang	Buku Tenggara	100,00		Sangat Efektif
36	Belang	Ponosakan Belang	98,24		Sangat Efektif
37	Belang	Borgo Satu	98,12		Sangat Efektif
38	Ratatotok	Ratatotok Satu	100,00	95,35	Sangat Efektif
39	Ratatotok	Ratatotok Dua	76,95		Efektif
40	Ratatotok	Ratatotok Selatan	99,50		Sangat Efektif
41	Ratatotok	Ratatotok Timur	90,83		Sangat Efektif
42	Ratatotok	Basaan	100,00		Sangat Efektif
43	Ratatotok	Basaan Satu	95,13		Sangat Efektif
44	Ratatotok	Morea	97,50		Sangat Efektif
45	Ratatotok	Morea Satu	100,00		Sangat Efektif
46	Ratatotok	Soyoan	95,05		Sangat Efektif
47	Ratatotok	Basaan Dua	93,86		Sangat Efektif
48	Ratatotok	Ratatotok Utara	97,77		Sangat Efektif
49	Ratatotok	Ratatotok Tenggara	99,60		Sangat Efektif
50	Ratatotok	Ratatotok Tengah	96,26		Sangat Efektif
51	Ratatotok	Ratatotok	95,77		Sangat Efektif
52	Ratatotok	Ratatotok Muara	92,05		Sangat Efektif
53	Tombatu	Tonsawang	98,02	96,36	Sangat Efektif
54	Tombatu	Betelan	100,00		Sangat Efektif
55	Tombatu	Tombatu Satu	99,39		Sangat Efektif
56	Tombatu	Kali	99,60		Sangat Efektif
57	Tombatu	Pisa	93,41		Sangat Efektif
58	Tombatu	Tombatu	99,41		Sangat Efektif
59	Tombatu	Betelan Satu	96,75		Sangat Efektif
60	Tombatu	Kali Oki	97,37		Sangat Efektif

61	Tombatu	Tombatu Tiga Selatan	96,52		Sangat Efektif
62	Tombatu	Tombatu Tiga Timur	100,00		Sangat Efektif
63	Tombatu	Tonsawang Satu	100,00		Sangat Efektif
64	Touluaan	Ranoketang Atas	95,37	96,42	Sangat Efektif
65	Touluaan	Tondanauw	95,43		Sangat Efektif
66	Touluaan	Lobu Satu	97,61		Sangat Efektif
67	Touluaan	Lobu Dua	96,36		Sangat Efektif
68	Touluaan	Tondanouw Satu	97,71		Sangat Efektif
69	Touluaan	Toundanouw Atas	97,47		Sangat Efektif
70	Touluaan	Ranoketang Atas Satu	97,38		Sangat Efektif
71	Touluaan	Lobu Kota	94,11		Sangat Efektif
72	Touluaan	Lobu Atas	99,92		Sangat Efektif
73	Touluaan	Lobu	92,79		Sangat Efektif
74	Touluaan Selatan	Kalait	94,77		96,79
75	Touluaan Selatan	Kalait Satu	95,35	Sangat Efektif	
76	Touluaan Selatan	Kalait Dua	98,58	Sangat Efektif	
77	Touluaan Selatan	Kalait Tiga	97,55	Sangat Efektif	
78	Touluaan Selatan	Lowatag	94,33	Sangat Efektif	
79	Touluaan Selatan	Bunag	100,00	Sangat Efektif	
80	Touluaan Selatan	Banga	98,92	Sangat Efektif	
81	Touluaan Selatan	Tambelang	100,00	Sangat Efektif	
82	Touluaan Selatan	Ranoako	93,47	Sangat Efektif	
83	Touluaan Selatan	Suhuyon	94,92	Sangat Efektif	
84	Silian Raya	Silian	98,46	98,48	Sangat Efektif
85	Silian Raya	Silian Utara	97,38		Sangat Efektif
86	Silian Raya	Silian Satu	94,40		Sangat Efektif
87	Silian Raya	Silian Selatan	100,00		Sangat Efektif
88	Silian Raya	Silian Dua	100,00		Sangat Efektif
89	Silian Raya	Silian Tengah	100,00		Sangat Efektif
90	Silian Raya	Silian Tiga	98,57		Sangat Efektif
91	Silian Raya	Silian Barat	99,06		Sangat Efektif
92	Silian Raya	Silian Kota	97,94		Sangat Efektif
93	Silian Raya	Silian Timur	98,94		Sangat Efektif

94	Tombatu Timur	Molompar	98,00	<b>98,08</b>	Sangat Efektif	
95	Tombatu Timur	Molompar Satu	97,21		Sangat Efektif	
96	Tombatu Timur	Molompar Atas	94,70		Sangat Efektif	
97	Tombatu Timur	Molompar Dua	98,08		Sangat Efektif	
98	Tombatu Timur	Molompar Dua Utara	99,01		Sangat Efektif	
99	Tombatu Timur	Molompar Dua Selatan	96,93		Sangat Efektif	
100	Tombatu Timur	Mundung	100,00		Sangat Efektif	
101	Tombatu Timur	Mundung Satu	100,00		Sangat Efektif	
102	Tombatu Timur	Esandom	100,00		Sangat Efektif	
103	Tombatu Timur	Esandom Satu	96,92		Sangat Efektif	
104	Tombatu Timur	Esandom Dua	98,00		Sangat Efektif	
105	Tombatu Utara	Tombatu Dua	96,62		<b>96,93</b>	Sangat Efektif
106	Tombatu Utara	Tombatu Dua Utara	93,63			Sangat Efektif
107	Tombatu Utara	Tombatu Dua Barat	96,11			Sangat Efektif
108	Tombatu Utara	Tombatu Dua Tengah	95,27	Sangat Efektif		
109	Tombatu Utara	Tombatu Tiga	97,61	Sangat Efektif		
110	Tombatu Utara	Tombatu Tiga Tengah	96,92	Sangat Efektif		
111	Tombatu Utara	Kuyanga	97,67	Sangat Efektif		
112	Tombatu Utara	Kuyanga Satu	100,00	Sangat Efektif		
113	Tombatu Utara	Winorangian	96,89	Sangat Efektif		
114	Tombatu Utara	Winorangian Satu	98,57	Sangat Efektif		
115	Pasan	Towuntu	83,64	<b>97,09</b>	Sangat Efektif	
116	Pasan	Towuntu Timur	100,00		Sangat Efektif	
117	Pasan	Towuntu Barat	98,22		Sangat Efektif	
118	Pasan	Tolombukan	98,15		Sangat Efektif	
119	Pasan	Tolombukan Satu	97,93		Sangat Efektif	
120	Pasan	Tolombukan Barat	98,21		Sangat Efektif	
121	Pasan	Liwutung	97,17		Sangat Efektif	
122	Pasan	Liwutung Satu	99,55		Sangat Efektif	
123	Pasan	Liwutung Dua	96,13		Sangat Efektif	
124	Pasan	Poniki	99,03		Sangat Efektif	
125	Pasan	Maulit	100,00		Sangat Efektif	
126	Ratahan Timur	Wioi	100,00	<b>98,45</b>	Sangat Efektif	

127	Ratahan Timur	Wioi Satu	98,20		Sangat Efektif
128	Ratahan Timur	Wioi Dua	98,47		Sangat Efektif
129	Ratahan Timur	Wioi Tiga	94,45		Sangat Efektif
130	Ratahan Timur	Wioi Timur	100,00		Sangat Efektif
131	Ratahan Timur	Pangu	100,00		Sangat Efektif
132	Ratahan Timur	Pangu Satu	96,21		Sangat Efektif
133	Ratahan Timur	Pangu Dua	100,00		Sangat Efektif
134	Ratahan Timur	Wongkai	100,00		Sangat Efektif
135	Ratahan Timur	Wongkai Satu	97,17		Sangat Efektif
<b>MINAHASA TENGGARA</b>			<b>97,17</b>		<b>SANGAT EFEKTIF</b>

